

PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK TURKI DAN MESIR TAHUN 2013

Renita Purnama Sari¹
Nim. 1102045140

Abstract

This research aims to explain the reason for the termination of diplomatic relations Turkey and Egypt the year 2013. The method in this research is descriptive-explanative. Data collection techniques used are engineering a secondary data source with the libraries that come from books, journals, media, internet, and other sources. Data analysis techniques using qualitative analysis. The results showed that the termination of diplomatic relations Turkey and Egypt in the year 2013 driven by reason of factors, namely the existence of a regime change in the Government of Egypt which was originally led by Mursi and was replaced by the US side, there is a difference the view among Erdogan in Turkey and the U.S. sides in Egypt, as well as the response of Turkey against the coup Government of Egypt considered too excessive.

Keywords: *Diplomatic Relations, Turkey, Egypt*

Pendahuluan

Turki dan Mesir adalah dua negara di Timur Tengah yang memiliki latar belakang agama, budaya dan sejarah yang sama, dimana kedua negara sama-sama pernah menjadi bagian kekuasaan Ottoman. Pada tanggal 1 November 1922 kekuasaan Ottoman runtuh dan Turki berubah menjadi Negara Republik. Sementara wilayah-wilayah lain termasuk Mesir berdiri sendiri dan setelah menjadi negara yang merdeka kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1925 serta menempatkan kedutaan besar dan konsulat jenderal di negara masing-masing. Selama beberapa tahun setelah menjalin hubungan diplomatik, hubungan Turki dan Mesir mengalami pasang surut karena tidak stabilnya hubungan kedua negara.

Hubungan Turki dan Mesir baik secara ekonomi dan politik terus membaik setelah naiknya Mursi sebagai pemimpin Mesir yang terpilih secara demokratis pada pemilihan Presiden Juni 2012. Pada tanggal 30 September 2012 Mursi melakukan kunjungan resmi ke Turki untuk memperkuat hubungan bilateral terutama kerjasama ekonomi dan perdagangan. Setelah kunjungan Mursi ke Ankara, Perdana Menteri Turki melakukan kunjungan balasan ke Kairo pada Desember 2012. Dalam kunjungan ini Erdogan membawa delegasi dalam jumlah yang besar yaitu sebanyak 200 orang pengusaha dan 12 orang menteri. Turki dan Mesir juga menandatangani kesepakatan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: renren123@gmail.com

tiga tahun Ro-Ro (*roll-on/roll-off*) yaitu sistem buka tutup jalur menuju pelabuhan Al-Adabiya di laut merah. Kesepakatan ini terkait dengan mempermudah kedua negara dalam hal transportasi hasil dagang masing-masing. Namun hubungan Turki dan Mesir terganggu ketikabaru 1 tahun menjabat sebagai Presiden akhirnya Mursi resmi digulingkan melalui kudeta oleh militer Mesir yang saat itu dipimpin oleh Jendral Al-Sisi pada tanggal 3 Juli 2013. Jenderal Al-Sisi mengumumkan ultimatum 48 jam bagi Mursi untuk mundur, menahan Mursi pasca kudeta, dan menangkap serta menembaki anggota Ikhwanul Muslimin yang di anggap militan Mursi. Ada beberapa alasan mengapa kudeta militer di Mesir terjadi antaranya adalah: Pertama, karena dominasi kelompok Ikhwanul muslimin di pemerintahan Mesir. Kedua, karena kondisi perekonomian Mesir memburuk setelah 1 tahun kepemimpinannya. Ketiga, adanya pelanggaran demokrasi dan HAM. Keempat, karena Dekrit Presiden 22 November 2012, Dekrit tersebut menyatakan bahwa Mursi mempunyai otoritas tertinggi, final, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Kudeta yang terjadi di Mesir mendapat perhatian dan respon dari negara-negara lain seperti Arab Saudi, Inggris, Indonesia, dan Turki. Salah satu negara yang memberikan respon secara tegas yaitu Turki, karena Turki menilai kudeta militer tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, apalagi Mesir masih berada dalam masa transisi. Proses demokratisasi yang masih labil tersebut masih perlu pengawalan dari berbagai pihak untuk mewujudkan negara yang demokratis. Dalam negara yang demokratis suatu keputusan tidak bisa diubah atau dibatalkan kecuali dengan cara yang demokratis pula, dimana suara atau aspirasi rakyat sangat menentukan pilihan negara.

Dengan adanya respon dan kecaman yang diberikan oleh Turki mengenai kudeta tersebut hubungan Turki dan Mesir memanas dan merenggang. Perdana Menteri Erdogan tidak hanya disampaikan melalui pidato resmi kenegaraan melainkan juga pada pidato-pidato di berbagai daerah dalam negeri maupun ketika melakukan kunjungan ke luar negeri seperti di Rusiadan PBB(Tim Redaksi 2013).Erdogan menginginkan semua orang menyuarakan hal yang sama dengan keberanian, menurutnya sikap Barat dan parlemen Eropa mengabaikan nilai-nilai demokrasi dengan tidak menyebut intervensi militer di Mesir sebagai kudeta. Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Erdogan, akhirnya pemerintah Mesir menanggapi serius kritikan dan pernyataan Erdogan sehingga Mesir mengambil tindakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Turki dan pemerintrah Turki pun merespon tindakan Mesir tersebut.

kibat dari tindakan yang diambil oleh kedua negara, akhirnya Turki dan Mesir memutuskan untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dalam waktu yang tidak ditentukan. Pemutusan hubungan diplomatik tersebut berpengaruh pada kerjasama-kerjasama yang telah dan yang akan dilakukan oleh Turki dengan Mesir. Menurut Menteri Perencanaan dan Kerjasama Internasional Mesir, Ashraf al-Arabi, ketegangan politik antara Kairo dan Ankara telah menyebabkan penangguhan kesepakatan bantuan Turki kepada Pemerintah Mesir sebesar \$ 1 miliar, di bidang perdagangan dan transportasi sebuah perusahaan bus Turki membatalkan pengiriman 600 unit bus ke Mesir. Di samping itu Pemerintah Mesir sendiri memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian perdagangan bebas antara Turki dengan Mesir yang akan

berakhir pada Maret 2015. Keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik ini jelas tidak ideal karena berakibat pada besarnya dampak yang akan dirasakan oleh kedua negara.

Tulisan ini akan menjelaskan alasan pemutusan hubungan diplomatik Turki dan Mesir tahun 2013.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Hubungan Diplomatik

Diplomasi adalah seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam hubungannya dengan negara lain. Dalam prakteknya, tidak semua hubungan diplomatik dapat berujung damai karena kepentingan antara dua negara yang menjalin hubungan diplomatik akan mengalami perubahan seiring perkembangan kondisi perpolitikan internasional.² Dalam beberapa kasus, suatu negara bahkan mengambil opsi pemutusan hubungan diplomatik untuk melindungi posisi kepentingan politik luar negerinya dilingkungan internasional.

Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari kepala perwakilan diplomatik (Duta Besar). Pasal 20-28 khusus mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik termasuk pembebasan berbagai pajak. Pasal 29-36 adalah mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan staf lain. Pasal 37-47 juga menyangkut kekebalan dan keistimewaan bagi para anggota keluarga para diplomat dan staf pelayanan yang bekerja pada mereka. Pasal 48-53 berisi berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, ratifikasi dan mulai berlakunya konvensi tersebut.³

Final Act pada konferensi 19 itu ditandatangani pada tanggal 18 April 1961 oleh perwakilan dari 75 negara. Protokol Opsional dan Konvensi masih terbuka untuk ditandatangani sampai tanggal 31 Oktober 1961 di Kementerian Luar Negeri Austria dan berikutnya sampai 31 Maret di Markas Besar PBB. Konvensi dan kedua Protokol Opsional diberlakukan tanggal 24 April 1964. Pada tanggal 31 Desember 1979, 130-negara mengakui Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.

Tujuan dari terjalannya hubungan diplomatik antara lain ialah meningkatkan hubungan-hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa yang diwujudkan dengan memberikan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik tanpa memandang perbedaan sistem konsistensi dan sosialnya. Hak-hak tersebut bukan untuk mencari keuntungan pribadi melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi dari perwakilan diplomatik dalam mewakili Negara serta menguatkan aturan-aturan Hukum kebiasaan Internasional yang tetap mengenai persoalan-persoalan yang tidak diatur secara jelas oleh ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1961.

²S.L.Roy. 1991. *DIPLOMASI*. Jakarta: CV. Rajawali, hal.17

³May Rudy, 2009, *Hukum Internasional 2*, P.T. Refika Aditama, Bandung, hlm. 67-68

Pemutusan hubungan diplomatik merupakan keputusan unilateral suatu negara yang menutup perwakilan diplomatiknya. Pemutusan hubungan diplomatik ini merupakan hal yang gawat dan biasanya dilakukan sebagai jalan terakhir bila cara-cara lain yang kurang radikal tidak memberikan hasil. Beberapa alasan suatu negara memutuskan hubungan diplomatiknya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bila terjadi perang antara kedua negara. Akan tetapi terdapat juga negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatiknya secara sepihak, yang dapat disebabkan karena adanya protes atau ketidaksetujuan terhadap tindakan illegal dari negara pengirim. Biasanya tindakan tersebut sebagai tindakan yang melanggar hukum nasional negara penerima dan sangat merugikan negara penerima, seperti mencampuri terlalu jauh kepentingan politik negara penerima, sehingga diambil tindakan sepihak.
2. Adanya kasus sengketa antara kedua negara yang sudah sebegitu rupa, sehingga tindakan apapun yang diambil seperti pengusiran diplomat atau pemanggilan kepala perwakilan masih tidak cukup.
3. Adanya kebijakan suatu negara yang sangat bertentangan dengan posisi negara lain ataupun kegiatan yang tidak wajar dari personel diplomatik (Bour Mauna, hal 539-540).

Teori Kebijakan Luar negeri

Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri merupakan upaya suatu negara untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.⁴ Kebijakan luar negeri ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Selain itu, dalam kebijakan luar negeri terdapat fenomena yang bersifat kompleks dan luas yang meliputi aspek kehidupan internal dan kehidupan eksternal. Kedua aspek tersebut meliputi aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi.

Sementara itu, menurut Holsti, kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya.⁵ Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut. Tujuan-tujuan yang hendak dicapai suatu negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: 1) nilai yang menjadi tujuan dari pembuat kebijakan, 2) jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan 3) tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.⁶

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para pemikir tentang kebijakan luar negeri di atas, secara garis besar kebijakan luar negeri merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu negara yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun faktor eksternal, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan eksternal negara tersebut dan bergantung pada kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh negara tersebut berdasarkan skala prioritas

⁴James N. Rosenau, et.al. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 27

⁵K.J. Holsti. 1988. *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall, hal. 21

yang telah ditentukan oleh suatu negara dan menentukan jenis kebijakan yang dikeluarkan.

Sementara itu, Rosenau mengklasifikasikan sumber-sumber utama dalam kebijakan luar negeri tersebut kedalam empat kategori, yang mana terdapat sumber yang berasal dari internal dan eksternal suatu negara,⁷ yaitu:

1. Sumber sistemik (*systemic sources*)
Sumber ini berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan antara negara-negara besar, pola aliansi antar negara, dan faktor eksternal lain, seperti isu area atau krisis.
2. Sumber masyarakat (*societal resources*)
Yaitu, sumber yang mencakup berbagai faktor yang berasal dari internal negara itu sendiri, antara lain berupa:
 - a. Kebudayaan dan sejarah, yang meliputi nilai, norma, tradisi, dan pengalaman.
 - b. Pembangunan ekonomi, yang mencakup kemampuan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan sendiri.
 - c. Struktur sosial, yang mencakup sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara atau seberapa besar konflik dan harmoni internal di dalam masyarakat.
 - d. Perubahan opini publik, yang mencakup perubahan sentimen masyarakat terhadap dunia luar.
3. Sumber pemerintahan (*governmental resources*).
Sumber ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintahan. Sumber ini berasal dari internal suatu negara pula. Dalam masalah pertanggungjawaban terhadap politik di suatu negara, pemimpin suatu negara yang memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan luar negeri dapat fleksibel untuk merespon situasi eksternal. Yang juga sangat berpengaruh dari sumber ini ialah struktur kepemimpinan yang berasal dari berbagai individu dan kelompok yang berbeda-beda.
4. Sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*)
Sumber ini berasal dari kepribadian elit-elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Hal ini juga meliputi persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil browsing data melalui jaringan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu penulis menganalisis data sekunder yang kemudian menggunakan teori dan konsep untuk

⁷Rosenau et al, World Politics, hal 15-18 dalam Coloumbis and Wolfe, Introduction to International Relation: Power and Justice, (Engle wood Cliffs: Prentice Hall, 1978), h. 129

menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti oleh penulis yaitu pemutusan hubungan diplomatik Turki dan Mesir tahun 2013.

Hasil Penelitian

Alasan Turki dan Mesir untuk memutuskan hubungan diplomatik sejak tanggal 23 November 2013 akan di analisis menggunakan konsep dan teori sesuai dengan teori yang digunakan pada bab I. Untuk menganalisis alasan pemutusan hubungan diplomatik Turki dan Mesir alat yang digunakan adalah teori kebijakan luar negeri yang memiliki empat sumber. Salah satu sumber yang tetap untuk menjawab rumusan masalah ialah sumber pemerintahan karena terjadi perubahan rezim di Mesir melalui kudeta.

Dan diperkuat dengan konsep hubungan diplomatik, ada beberapa alasan negara memutuskan hubungan diplomatiknya. Salah satunya yaitu alasan pemutusan hubungan Turki dan Mesir terjadi karena adanya pertentangan kebijakan antara kedua negara. Dan adanya perbedaan pandangan antara Turki dan Mesir di masa kepemimpinan As-Sisi. Adapun faktor-faktor yang mendorong pemutusan hubungan diplomatik tersebut antara lain:

1. Adanya perubahan rezim dalam pemerintahan Mesir yang semula dipimpin oleh Mursi dan digantikan oleh As-Sisi.

Perubahan rezim pemerintahan yang terjadi di Mesir merupakan salah satu factor yang membuat pemutusan hubungan diplomatik antara Turki dan Mesir dengan menggunakan alat analisis sesuai teori yang digunakan yang terdapat dalam teori kebijakan luar negeri yaitu sumber pemerintahan.

Proses pemilihan umum dan pelantikan presiden Mesir telah menandai erabaru politik dan pemerintahan di Mesir. Mursi merupakan presiden pertama dari kalangan sipil dan dipilih melalui pemilihan umum secara bebas dan demokratis. Pemilihan Mursi didukung oleh Ikhwanul Muslimin yang merupakan babak baru demokrasi Mesir setelah presiden Husni Mubarak digulingkan oleh gerakan demonstrasi dan memakan banyak korban jiwa. Gerakan demokrasi di Mesir tersebut merupakan rangkaian dari gelombang demokratisasi yang disebut Musim Semi Arab (Arab Spring) yang melanda beberapa negara termasuk Tunisia, Libya, Mesir, Suriah, dan Yaman.

Sebagai presiden baru Mursi membawa angin segar untuk perubahan bagi masyarakat Mesir, tugas baru sudah menanti pemerintahan Mursi untuk membuat perubahan yang pasti terkait reformasi di Mesir. Pemimpin dunia banyak yang memberikan selamat terhadap kemenangan Mursi dalam pemilihan umum yang berlangsung demokratis dan damai. Beberapa bulan sebelumnya, tidak terbayangkan jika Mohammad Mursi Eissa al-ayat akan menjadi pemimpin di Mesir yang pertama pasca-revolusi.

Setelah resmi menjadi presiden Mesir kebijakan luar negeri pada era Mursi terlihat lebih cenderung ke arah upaya untuk membangun kembali kedekatan dengan negara-negara di Timur Tengah, berbeda dengan era sebelumnya yaitu Mubarak yang mengedepankan kerjasama dengan Amerika serikat khususnya dalam ekonomi dan militer. Mesir menerima sebanyak 2 miliar dolar Amerika

Serikat setiap tahunnya dari Amerika untuk merubah persenjataan yang semulanya Mesir berbasis teknologi dari Uni Soviet menjadi teknologi berbasis Amerika Serikat yang berbentuk dana ataupun senjata yang diberikan. Selain itu dalam hal ekonomi Mesir membentuk US-Egypt partnership untuk pertumbuhan ekonomi yang dibentuk oleh mantan wakil presiden Amerika Serikat Al-Gore dan Mubarak untuk meningkatkan sektor privat di Mesir dan mempromosikan US-Egypt partnership. Mubarak juga memberikan timbal balik atas bantuan-bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Mesir, contohnya adalah pada masa perang Iran-Iraq Mesir menjanjikan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan udara Mesir dan memberikan bantuan berupa tentara sebanyak 40.000 orang serta menjanjikan Amerika Serikat untuk melalui terusan Suez untuk membantu Amerika Serikat dalam memenangkan perang melawan Iraq yang telah menginvasi Kuwait.

Perbedaan kebijakan Mursi yaitu membuka pintu perbatasan antara Mesir dan Palestina pada bulan Juli 2013, menunjukkan kebijaksanaan Mursi dalam menjalankan politik luar negeri, karena dianggap lepas dari tekanan Israel. Dibukanya perbatasan Mesir-Palestina memudahkan penduduk Gaza yang berjumlah sekitar 1,5 juta jiwa mendapat akses ke negara Mesir, karena selama ini mereka di blockade oleh Israel dan dihalang-halangi oleh Mesir untuk masuk ke negara mereka. Terbukanya kembali perbatasan Rafah menurut Alan Phils, penulis harian di The National, UEA, menunjukan adanya gap antara Mesir dengan Israel, dan menunjukan sinyal bahwa politik luar negeri Mesir telah berubah dan Mesir akan bertindak tanpa harus berkonsultasi dengan Israel.

Sikap Mesir yang menunjukkan keberpihakan kepada Palestina kembali terlihat saat pemberian status baru yang diberikan kepada Palestina oleh PBB sebagai permanent observer. Status ini didukung oleh 138 negara dan Mesir termasuk didalamnya sehingga menghasilkan resolusi 67/19 Majelis Umum PBB. Masyarakat Palestina terutama Gaza menyadari bahwa mereka menaruh harapan yang besar pada Mursi, yang akan lebih simpati dengan mereka, dan memiliki kedekatan ideologis dengan organisasi nomor satu di Gaza yaitu Hamas. Diakui Mesir bahwa pembukaan perbatasan Rafah ini belum mengakhiri blokade terhadap Gaza namun menunjukkan perubahan yang signifikan.

Upaya yang dilakukan oleh Mursi dalam melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah dapat terlihat dengan kunjungan Mursi. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menormalkan hubungan Mesir dengan negara-negara yang dominan di Timur Tengah. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan Mursi ke Iran dalam rangka menghadiri KTT Non-Blok pada Agustus 2012 di Tehran. Kunjungan Mursi merupakan kontak pertama hubungan antara Mesir dan Iran sejak terjadinya pemutusan hubungan diplomatik tahun 1979. Kemudian presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, membalas kunjungan Mursi tersebut dengan kunjungan balik ke Mesir dalam rangka Konferensi OKI pada Februari 2013.

Langkah yang di ambil oleh Mesir ini sebagai wujud konsekuensi dari upaya menjadi kekuatan dominan di kawasan dengan melakukan rekonsiliasi negara-

negara dominan di Timur Tengah. Mursi memperkuat hubungan dengan Arab Saudi serta mengambil langkah aktif terhadap krisis yang terjadi di Suriah. Mesir berhasil mengajak Arab Saudi, Turki dan Iran sebagai kelompok Islam untuk membantu menyelesaikan konflik Suriah. Upaya Mursi untuk melibatkan Iran dalam kontak grup penanganan krisis Suriah merupakan bagian dari keinginan Ikhwanul Muslimin dalam merangkul negara-negara Islam dalam satu kekuatan. Mursi juga mengunjungi Ethiopia menghadiri KTT Uni Afrika yang tidak pernah dihadiri oleh Mubarak sejak tahun 1995.

Walaupun Mesir merupakan sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah namun Mursi tidak menunjukkan aksi positif dalam hubungan Mesir-AS sebagai mitra strategis. Mursi menyatakan bahwa pemerintahannya akan menjaga hubungan baik dengan Barat akan tetapi tidak akan sama seperti rezim yang terdahulu. Mursi meminta Amerika Serikat untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap kemerdekaan Palestina. Amerika Serikat dinilai bertanggung jawab memenuhi perjanjian Camp David 1978 untuk memaksa Israel menarik mundur pasukan dari Gaza dan Tepi Barat serta menyerahkan pemerintahan secara penuh pada masyarakat Palestina.

Dalam menetapkan kebijakan luar negeri, Mesir memiliki beberapa lembaga yang berperan central antara lain presiden, kementerian luar negeri, militer dan intelejen (GIS). Masing-masing lembaga ini berwenang untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang menuntut untuk dikeluarkannya suatu kebijakan. Kewenangan ini tentu saja harus dalam situasi dan kondisi yang spesifik yang harus berurusan langsung dengan lembaga tersebut.

Lembaga kepresidenan tentunya mempunyai peranan yang lebih signifikan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Posisi presiden sebagai aktor utama dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri yang sudah diambil oleh presiden kemudian diserahkan kepada kementerian luar negeri Mesir untuk di terapkan pelaksanaannya, baik hal yang berupa strategis maupun teknis. Namun dengan kewenangan sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan tentu saja rawan akan hak-hak yang ada dan terkadang mengabaikan lembaga-lembaga lain yang juga memiliki keterkaitan dengan proses pengambilan kebijakan luar negeri di Mesir hal itu di buktikan dalam contoh berikut, Mursi yang diangkat dari partai FJP yang merupakan sayap kanan tentu saja memilih orang-orang dari aliran tersebut untuk bersama-sama menjalankan kebijakan luar negerinya. Salah satunya adalah Essam Al-Haddad yang juga berasal dari kelompok islamis yang sama dengan Mursi yaitu Ikhwanul Muslimin, Essam ditunjuk sebagai penasehat Mursi dalam membuat kebijakan luar negeri. Essam telah beberapa kali melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan Eropa bersama dengan tim penasehat lainnya sebagai delegasi Mesir yang diutus oleh Mursi. Bahkan Essam Al-Haddad tercatat lebih sering menyambut menteri negara lain yang berkunjung ke Mesir dibandingkan dengan Menteri luar negeri sendiri yaitu Mohamed Kamel Amr.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Mursi tidak terlepas dari pengaruh Ikhwanul Muslimin yang memiliki jaringan dan sayap politik yang kuat serta

besar di Mesir. Ikhwanul Muslimin menjadikan agama sebagai instrumen utama pergerakan yang mampu memperoleh dukungan legitimasi dari rakyat Mesir.⁸ Ikhwanul Muslimin mengambil alih semua sektor pemerintahan dan menduduki kursi parlemen. Kelompok Ikhwanul Muslimin tidak melibatkan dan memasukan orang-orang revolusioner yang pernah menjabat pada rezim Mubarak. Kondisi yang seperti itu harusnya Ikhwanul Muslimin mampu berbagi kekuasaan (koalisi) dengan kekuatan-kekuatan revolusioner lainnya. Apalagi kelompok-kelompok rezim Husni Mubarak yang masih sangat kuat di Mesir yang diwakili oleh kelompok militer, kepolisian, aparat hukum, media, dan juga lembaga keagamaan seperti Al-Azhar. Semua lembaga tersebut belum terjadi reformasi sejak pejabatnya dipilih pada kepemimpinan Mubarak. Seperti Ahmad Syafik merupakan salah satu pesaing kuat Mursi dalam pemilu.

Pada saat Mursi dan Ikhwanul Muslimin menawarkan dialog dan berbagi kekuasaan kepada kelompok oposisi namun ditolak karena dianggap sudah terlambat, apalagi pada saat itu posisi Mursi sebagai presiden dan Ikhwanul Muslimin sudah terdesak dari kursi pemerintahan. Pada akhirnya kelompok oposisi yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi mengukudeta Mursi yang berkoalisi dengan militer, kepolisian dan orang-orang sisa rezim Mubarak di lembaga-lembaga tinggi negara yang dulu mereka lawan.

Aparat keamanan dan hukum senjata melakukan pembiaran pada aksi-aksi demonstrasi yang menentang Mursi dan Ikhwanul Muslimin. Pemerintahan Mursi terus menerus digoncang demonstrasi dan akhirnya dilengserkan oleh Jenderal Al-Sisi yang didukung kelompok oposisi dengan alasan penyelamatan bangsa dan negara dari perpecahan. Dan Ikhwanul Muslimin disebut sebagai organisasi terlarang dan jelas merupakan pukulan telak bagi partai Islam dan demokrasi. Mesir kembali dikuasai oleh militer hal ini menuai banyak protes dari semua kalangan yang tidak dapat menerima kudeta Mursi yang dilakukan oleh kelompok oposisi yang didukung oleh militer.⁹

Setelah kudeta dilakukan oleh militer, ketua Mahkamah Konstitusi Mesir Adly Mansour, dilantik menjadi presiden Mesir sementara yang ditunjuk oleh Al-Sisi. Adly Mansour dilantik dibawah rencana transisi yang telah dirancang oleh militer. Sebagai seorang pemimpin sementara dalam menjalankan tugas negara. Adly Mansour dibantu oleh sebuah dewan pemerintahan sementara dan semua pemerintahan yang dikelola oleh teknokrat, hingga pemilihan presiden baru

⁸Adhi Cahya Fahadayna, 2012, *pengaruh ikhwanul muslimin terhadap politik luar negeri mesir dalam konflik israel-palestina*, skripsi, Universitas Airlangga, dalam <http://3A%2F%2Fjournal.unair.ac.id%2FfilerPDF%2FJurnal%2520Skripsi%2520Adhi> (22-04-2018)

⁹Ikhwanul Kiram Mashuri, 2014, *kacamata kuda Ikhwanul Muslimin*, dalam <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/03/02n1skpi-kacamata-kuda-ikhwanul-muslimin>, diakses pada 8 maret 2018

dilaksanakan. Pelantikan Adly Mansour merupakan puncak dari revolusi kedua Mesir yang menggulingkan Mursi yang didukung Ikhwanul Muslimin.¹⁰

Pemerintahan Mesir yang dipimpin oleh Adly Mansour melakukan amandemen konstitusi untuk merancang perubahan dalam pemilu parlemen dan presiden yang baru. Pemilu dilakukan pada tahun 2014 yang diselenggarakan tiga hari oleh pemerintah Mesir. Hasil dari pemilu, Abdul Fattah Al-Sisi keluar sebagai pemenang dalam pemilihan presiden Mesir tahun 2014. Pasca kemenangan Al-Sisi, rakyat Mesir berunjuk rasa pada Juni 2014 setelah Al-sisi menang telak dalam jejak pendapat yang dianggap pengamat Uni Eropa telah sesuai dengan hukum.¹¹ Masyarakat Mesir yang mendukung Mursi melakukan protes di seluruh kota Mesir, para demonstran yang turun ke jalan di Ibukota Kairo, Bani Suef, dan Fayoum, memegang spanduk dengan mengibarkan foto-foto Mursi dan menyanyikan slogan-slogan menentang presiden yang terpilih.¹² Dan Mursi dari Ikhwanul Muslimin dimasukkan dalam daftar hitam oleh otoritas militer sebagai organisasi teroris, yang menyerukan untuk memboikot pemilu.

Para pendukung Al-Sisi, dari awal mengetahui bahwa kemenangan Al-Sisi adalah suatu kepastian. Masyarakat lainnya yang tidak mendukung Al-Sisi memiliki kecemasan dan ketidakpastian setelah Al-Sisi memenangkan pemilu. Mereka beranggapan bahwa Al-Sisi tidak memiliki rencana konkret untuk membawa Mesir keluar dari kesengsaraan karena Al-Sisi akan memimpin Mesir dengan gaya otokratik seperti yang pernah dilakukan oleh Husni Mubarak. Sejak pemilihan presiden di Mesir dilaksanakan Abdul Fattah Al-Sisi sudah mendapatkan banyak dukungan untuk kemenangannya, namun partisipasi rakyat Mesir untuk memilih tetap rendah, hanya 44% yang pergi ke TPS untuk memilih. Ikhwanul Muslimin mendesak untuk melakukan pemboikotan pemilu karena Al-Sisi telah melakukan penipuan dan muslihat sejak terjadinya kudeta, serta mengadili Mursi dan beberapa pendukung Ikhwanul Muslimin yang diadili dengan tuduhan atas tewasnya para demonstran yang anti terhadap pemerintahan Mesir. Tidak hanya itu Al-Sisi juga memberikan putusan untuk melakukan hukuman mati terhadap Mursi dan pendukung Mursi.¹³

Setelah satu tahun menjabat sebagai pemimpin Mesir, para analisis mengatakan bahwa karakteristik utama kekuasaan satu tahun Al-Sisi di Mesir adalah peningkatan aspek keamanan dan penyanderaan demokrasi di bawah kekuasaan militer. Kinerja pemerintahan Al-Sisi selama satu tahun (2014-2015) menunjukkan bahwa rezim hasil kudeta menjadikan pemulihan ekonomi dan situasi keamanan

¹⁰harian kompas: news Internasional, 2013, *Adli Mansour Dilantik Menjadi presiden Interim Mesir*, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2013/07/04/1748424/Adli.Mansour.Dilantik.Menjadi.Presiden.Interim.Mesir>, diakses pada 20-04-2018

¹¹Ibid.,

¹²*Paska Kemenangan Sisi, Rakyat Mesir Protes di Berbagai Daerah*, 2014 dalam, <http://www.voaindonesia.com/read/world-news/2014/05/31/30688/paska-kemenangan-sisi-rakyat-mesir-protes-di-berbagai-daerah/#sthash.guVJwekt.dpbs>. Diakses pada 22-04-2018

¹³*Hasil Awal Pemilu Mesir Tunjukan Sisi Unggul Besar*, dalam <http://www.voaindonesia.com/a/hasil-awal-pemilu-mesir-tunjukan-sisi-unggul-besar/1924946.html>. diakses pada 22-04-2018

Mesir sebagai dua prioritas utama kebijakan nasionalnya bahkan dengan cara menumpas oposisi. Presiden Al-Sisi dan pendukungnya menilai bahwa kinerja selama satu tahun memberikan hasil yang baik untuk perekonomian Mesir dan menuju ke arah pertumbuhan. Secara umum, program ekonomi pemerintah Al-Sisi dapat ditelusuri dalam bidang-bidang seperti, pemangkasan subsidi dan kenaikan harga bahan bakar serta upaya untuk menarik investasi asing dan pembukaan terusan Suez Baru.

Salah satu kebijakan pemerintah Al-Sisi di sektor ekonomi pada tahun pertama kekuasaannya adalah memangkas subsidi dan bahan bakar. Pemerintah juga menaikkan harga bahan bakar hingga 78% dengan tujuan memotong beban subsidi anggaran yang semakin membengkak. Pemangkasan subsidi telah membuat anggaran fiskal Mesir mampu berhemat 40 miliar dolar. Kebijakan ekonomi Al-Sisi juga fokus menarik investasi asing dan bantuan luar negeri. Dalam konferensi investasi Internasional yang digelar di Kairo pada Maret 2015, Al-Sisi mengatakan bahwa Mesir membutuhkan dana 200-300 miliar dolar untuk pembangunan dan Al-Sisi menginginkan negaranya keluar dari keterpurukan ekonomi. Pemerintah Mesir berharap dapat mengatasi kekurangan pasokan listrik lewat investasi baru dan menyiapkan ruang untuk penanaman modal di sektor-sektor lain.

Meski demikian, regulasi investasi asing di Mesir sangat berbelit dan menyulitkan para pemilik modal. Sistem birokrasi untuk menarik modal asing masih sangat rumit ditambah lagi dengan tarif pajak penghasilan yang tinggi dan sistem pertukaran valas. Menurut keterangan Menteri Investasi Mesir Ashraf Salman, investor asing harus mendapatkan izin dari 78 instansi pemerintah untuk memulai sebuah investasi di Mesir, sebuah proses yang bisa memakan waktu sampai lima tahun. Ashraf Salman mengatakan pemerintah ingin mereformasi sistem birokrasi investasi asing dan memangkas perizinan. Kendala lain investasi asing di Mesir berhubungan dengan tarif pajak penghasilan yang tinggi. Pemerintah Al-Sisi berjanji akan memangkas tarif pajak penghasilan menjadi 22,5 persen untuk individu dan perusahaan, dari tingkat saat ini 30 persen.

Pemerintah Mesir membuka Terusan Suez Baru untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Terusan Suez merupakan sumber kedua pendapatan pemerintah Mesir setelah sektor pariwisata. Para pejabat Mesir mengatakan Terusan Baru Suez ditargetkan bisa meningkatkan pendapatan dari lalu lintas kapal tahunan Terusan Suez dari 5,3 miliar dolar pada 2015 menjadi 13,4 miliar dolar pada 2023 serta menarik investasi asing besar yang menciptakan ribuan lapangan kerja. Menteri Perencanaan Mesir, Ashraf Al-Araby mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Mesir pada tahun 2014 sekitar 4% dan pertumbuhan pada tahun fiskal 2013-2014 hanya 2,2%. Meskipun telah banyak kemajuan dari perekonomian Mesir di satu tahun pemerintahan Al-Sisi, namun menurut kubu oposisi dan kritikus pemerintah Al-Sisi percaya bahwa kemajuan tidak terlihat dalam perekonomian di tahun 2016, karena pemerintah hanya mengandalkan bantuan asing dan pinjaman luar negeri dari negara-negara Arab di Teluk Persia. Menurut mereka, statistik dan angka-angka yang diumumkan pemerintah bukan indikasi dari pertumbuhan ekonomi dan dampak dari kebijakan ekonomi Al-Sisi.

Pengakuan Al-Sisi pada Maret 2015 bahwa Mesir membutuhkan dana 200-300 milyar dolar untuk pembangunan, merupakan sebuah indikasi dari ketergantungan pemerintahnya pada bantuan asing. Dalam pandangan para kritikus, program reformasi subsidi pemerintah menghemat anggaran 40 milyar dolar, namun langkah itu telah menciptakan masalah baru bagi rakyat Mesir. Mereka juga mengkritik program satu juta rumah Al-Sisi yang sampai saat ini tidak terealisasi. Para kritikus juga mengkritik peran militer dalam perekonomian Mesir, banyak yang menyebutkan bahwa militer mengendalikan 40% perekonomian di Mesir. Para Kritikus percaya bahwa militer Mesir telah menguasai proyek-proyek ekonomi Mesir dalam satu tahun terakhir, terutama proyek Terusan Suez. Menurut mereka penghasilan dari proyek itu masuk dalam kantong para pejabat militer.

2. *Adanya perbedaan pandangan antara Erdogan di Turki dan As-Sisi di Mesir.*

Salah satu faktor pemutusan hubungan diplomatik Turki dan Mesir adalah pertentangan kebijakan politik antara Turki dan Mesir. Perubahan rezim pemerintahan yang terjadi di Mesir dari pemerintahan sipil dan kembali ke pemerintahan militer membuat pandangan yang berbeda bagi pemerintah Turki. Pemerintah Turki mendukung penuh pemerintahan Mesir yang dipimpin oleh Mursi akan tetapi pemerintahan Mursi hanya bertahan hanya satu tahun kepemimpinan. Faktor tersebut didukung dengan alat analisis menggunakan konsep hubungan diplomatik yang terdapat tiga alasan dan salah satunya yaitu adanya pertentangan kebijakan suatu negara dengan posisi negara lain.

Pandangan politik yang sama dengan Mursi membuat Erdogan mendukung Mursi. Keberpihakan Turki pada perjuangan umat Islam di Palestina, merupakan kebijakan luar negerinya untuk mendukung Palestina sama dengan pada saat Mursi menjadi presiden. Erdogan secara aktif mengunjungi berbagai negara untuk melakukan lobi untuk mendukung perjuangan Palestina. Dengan berbagai rintangan dan hambatan di hadapan kepentingan dan kebijakan, pemerintahan Turki berupaya memberi langkah pasti terhadap pembelaan kepada negara Islam yang tertindas. Hal tersebut tercermin kembali melalui kebijakan-kebijakan yang ada dalam aksi politik Erdogan sebagai pejabat pemerintahan Turki yang pada dasarnya kontradiksi pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Salah satu kebijakan Turki yaitu menolak isolasi gerakan perlawanan Islam Hamas dan bersikeras berinteraksi dan berkerjasama dengannya dalam kedudukannya sebagai pemerintah resmi dan terpilih secara demokratis, serta mengutuk keras pembantaian Israel terhadap Jalur Gaza, serta berbagai kebiadapan lainnya selama beberapa tahun terakhir di Palestina.

Dengan kebijakan luar negeri Turki yang telah di realisasikan membuat Turki di bawah AKP dan Erdogan menjadi tempat untuk para aktivis Islam berlabuh, dan seluruh kekuatan-kekuatan Islam yang ingin membangun komunikasi politik dan kerjasama antar gerakan dan mereka bisa bertemu di Istanbul Turki. Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Erdogan yaitu pencabutan larangan memakai jilbab, yang dulu diberlakukan oleh Kemal Ataturk sebagai pendiri negara Turki sekuler. Erdogan mengatakan kepada masyarakat Turki bagaimana mungkin

Eropa dan Amerika yang jauh lebih sekuler dibanding Turki masih membolehkan masyarakatnya menggunakan jilbab, sementara Turki malah melarang. Erdogan pun akhirnya mengangkat logika ini untuk menyerang para anti Islam yang berlindung dibalik ideology sekuler.

Akhirnya pada pemilu 2007, partai AKP yang dipimpin oleh Erdogan mendapat suara yang sangat besar 46,7 %. Suatu perolehan yang belum pernah terjadi di pemilu Turki secara demokratis. Angka ini menjadikan AKP memperoleh 340 kursi dari 550 kursi di parlemen.¹⁴ Dalam kemenangan ini Erdogan dan partainya mengajukan proposal RUU Paket Demokrasi. Yang diantaranya yaitu undang-undang yang membolehkan jilban di sekolah, kampus, dan kantor-kantor pemerintahan. Dengan suara mayoritas yang dimiliki AKP di parlemen, Erdogan dapat mengarahkan seluruh kebijakan politik negara sesuai dengan visinya. AKP dan Erdogan berhasil membuat militer yang selama ini menjadi *king maker* dan *trouble maker* politik Turki menjadi tunduk. Selama pemerintahan AKP, militer dikembalikan ke barak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terhadap kekuatan militer yang berpengaruh, yaitu sesuai standar politik dan konstitusi yang harus diambil Turki agar bias diterima menjadi anggota Uni Eropa dengan konstitusi baru dan menjauhkan lembaga militer dari politik, sipil dan pengadilan.

Sedangkan kebijakan politik di Mesir yang dipimpin oleh Al-Sisi yaitu perintah Al-Sisi meningkatkan politik represif terhadap para pemimpin dan pendukung kelompok Ikhwanul Muslimin, di mana suasana politik semakin tidak stabil dan menambah kekhawatiran rakyat atas kondisi negara. Pemerintah Mesir di tahun kedua kepemimpinan Al-Sisi mengajukan RUU kontra-terorisme yang lebih komprehensif, untuk lebih mempersempit ruang gerak kelompok oposisi hingga pada akhirnya memberantas mereka. Berdasarkan RUU tersebut, pemerintah Mesir berhak mengambil tindakan dalam segala bentuk konsentrasi, menangkap para penentang pemerintah dengan alasan mendukung teroris, dan dapat menangkap kelompok manapun dengan alasan mendukung terorisme. Dalam kondisi seperti ini, Al-Sisi memanfaatkan RUU tersebut untuk menghapus kebebasan berpendapat di negara Mesir.

Dengan kebijakan tersebut membuat peluang untuk menindak keras Ikhwanul Muslimin seperti dengan penangkapan dan hukuman berat serta tidak adil terhadap pemimpin dan anggota kelompok ini, ketidakadilan tersebut sangat jelas terlihat ketika pengadilan Mesir menjatuhkan hukuman mati secara massal terhadap ratusan anggota Ikhwanul Muslimin. Selama kekuasaannya, melalui penetapan berbagai undang-undang membatasi kebebasan sipil, Al-Sisi selangkah demi selangkah berupaya mewujudkan mimpi untuk memperkuat junta militer, sama seperti yang pernah dilakukan oleh mantan pemimpin Mesir sebelumnya Husni Mubarak. Selama pemerintahannya menjadi pemimpin Mesir, Al-Sisi berjanji akan berjalan di jalur demokrasi. Akan tetapi hasil dari kinerjanya dan juga penetapan undang-undangnya, justru mengacu pada penjajalan hak-hak sipil, kebebasan berpendapat dan demokrasi di Mesir.

¹⁴ Historical of Development Party1, dalam <http://eng.akparty.org.tr/english/index.html>, diakses pada 14 Maret 2018

Dalam kebijakan luar negeri, Al-Sisi memilih memperkuat hubungan dengan Federasi Rusia, mengikuti kebijakan regional Arab Saudi dalam batasan tertentu dengan tujuan menarik bantuan ekonomi, menentang intervensi asing dan militer dalam kasus Suriah dan Irak, menjaga hubungan tradisional dengan Amerika Serikat, melanjutkan kemitraan dengan Uni Eropa dan memperkuat hubungan dengan rezim Zionis Israel. Konstitusi baru Mesir memberikan kekuasaan pada militer untuk berkuasa sesuai kepentingannya. Hal itu dapat menjelaskan bahwa militer tidak mau dikembalikan ke barak dan mengalami kemunduran menjadi tentara pretorian. Karena pretorianisme mengacu pada situasi di mana tentara tampil sebagai aktor politik utama dan dominan yang secara langsung menggunakan kekerasan atau mengancam untuk merebut suatu kekuasaan.

3. Respon Turki terhadap kudeta militer yang di anggap pemerintah Mesir terlalu berlebihan.

Respon yang diberikan oleh Turki juga salah satu faktor dari sumber pemerintahan sebagai alat analisis. Turki adalah salah satu pihak yang mengecam kudeta militer yang terjadi di Mesir. Kecaman kudeta militer Mesir tahun 2013 oleh Turki tidak bisa dilepaskan dari kedekatan hubungan antara AKP dengan partai pemenang pemilu di Mesir yaitu Freedom and Justice Party (FJP). Kedua partai ini sama-sama lahir dari semangat keislaman. AKP dilatarbelakangi dengan partai pendahulunya, yaitu Partai Refah. Sedangkan FJP dengan organisasi Ikhwanul Muslimin.

Ada anggapan yang menyatakan bahwa AKP merupakan representasi dari ideologi politik Ikhwanul Muslimin, mengingat dekatnya hubungan emosional dan spiritual pemimpin AKP dengan FJP. Kedua partai ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu ingin melepaskan belenggu kediktatoran dan berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mengakomodir nilai-nilai keislaman.¹⁵ Anggapan kedekatan tersebut dapat ditelusuri sejak tanggal 8 Februari 2011 sebelum rezim Husni Mubarak dilengserkan, salah satu petinggi Ikhwanul Muslimin Mesir, Ashraf Abdel Ghaffar bertolak menuju Turki. Kepergiannya ke Turki menjadi manuver politik penting bagi gerakan Ikhwan Mesir dalam rangka mengakhiri kediktatoran Husni Mubarak selama 30 tahun. Ghaffar memintasuaka politik kepada Pemerintah Turki dan tinggal di Turki hingga rezim Husni Mubarak tumbang oleh aksi protes rakyat.

Ghaffar memuji peran yang dimainkan pemerintah Turki dalam mendorong demokratisasi di Timur Tengah. Ia berjanji dihadapan awak media Turki akan menjadikan AKP sebagai model Mesir pasca rezim Husni Mubarak lengser, dari kedekatan tersebut, AKP mendukung penuh pemerintah Presiden Mursi.¹⁶ Hal tersebut dibuktikan dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Turki kepada

¹⁵Arslantas, Duzgun. 2013. *"The Political Analysis of the Muslim Brotherhood and the AKP Tradition: Why did Turkish Model Fail in Egypt? A Thesis Submitted to the Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University"*. Diakses dari etd.lib.metu.edu.tr/upload/12616419/index.pdf. 16 Februari 2017

¹⁶Dzakirin, Ahmad. 2012. *Kebangkitan Pos-Islamisme Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu Solo: Era Adicitra Intermedia*

Pemerintahan Mursi di awal masa jabatannya agar segera pulih dari krisis ekonomi akibat revolusi 2011. Bantuan yang diberikan oleh Turki yaitu Perdana Menteri Erdogan mengajak sekitar 250 orang pengusaha Turki pada kunjungannya ke Mesir dan telah menginvestasikan hampir \$ 2 milyar di Mesir baik berupa perusahaan tekstil, retail, makanan dan konstruksi untuk perbaikan negara Mesir.¹⁷

Selain kedekatan hubungan antara Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) dengan Ikhwanul Muslimin yang menjadi alasan yaitu dominasi kader AKP di Parlemen Turki. Kemenangan AKP dimulai pada tahun 2002 sejak saat itu AKP mulai menduduki kursi parlemen dengan jumlah yang cukup signifikan. Kemenangan tersebut terus berlanjut sampai pada pemilu terakhir yang dilaksanakan, yaitu pada tahun 2011. Pada pemilu 2011, AKP memperoleh 327 dari total 550 kursi di parlemen.¹⁸ Jumlah tersebut melebihi setengah dari jumlah total kursi yang ada di parlemen. Penguasaan kader AKP yang duduk di parlemen memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri Turki. Terlebih, baik Presiden ataupun Perdana Menteri Turki berasal dari kader AKP, menjadikan kepentingan AKP seperti tanpa halangan untuk diadopsi menjadi kebijakan negara. Pada mekanisme pengambilan kebijakan politik luar negeri Turki dirumuskan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) kemudian oleh Perdana Menteri dan diteruskan ke Parlemen, dalam setiap tahapannya, kader AKP mendominasi. Dominasi kader AKP tersebut mempermudah pengkondisian kebijakan mengancam dan menentang kudeta militer Mesir 2013.

Kecaman Turki tidak bisa dilepaskan dari sejarah Turki di masa lalu, bahwa kudeta akan membawa akibat yang sangat berat bagi rakyat dan juga akan memperburuk keadaan dalam negeri, baik dari ekonomi ataupun kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Erdogan selain mengancam kudeta juga mengancam tindakan militer Mesir yang sangat represif dalam menghadapi pendukung Mursi yang mengakibatkan jatuh korban kurang lebih menewaskan 638 orang dan melukai 4.000 orang pada hari Rabu 14 Agustus 2013.¹⁹ Erdogan menyatakan kesangsiannya terhadap legitimasi Al-Sisi sebagai Presiden Mesir melalui pidato-pidato di majelis umum PBB. Erdogan memperingatkan bahwa tindakan militer seperti kudeta itu sangat jahat, kudeta mengorbankan rakyat, masa depan dan demokrasi. Disamping itu, Perdana Menteri Erdogan menyatakan menentang dan tidak akan menghormati pemerintahan hasil kudeta militer.

Tindakan yang dilakukan oleh Turki ini bisa diartikan sebagai ancaman terhadap Mesir untuk mengembalikan keputusan legal. Selain itu, berkaitan dengan normalisasi hubungan Turki dan Mesir, Erdogan memberikan syarat kepada Al-Sisi yaitu harus membebaskan mantan presiden Mursi dan pendukung Ikhwanul

¹⁷Karamuk, Oguz. "Will Erdogan's Policies Endanger Turkish Investments in Egypt?" 2012
<http://www.al-monitor.com/pulse/fa/business/2013/07/turkey-businessmen-egypt-fear-erdogan-support-morsi.html#>. Diakses pada 30 Juli 2017

¹⁸Thorp, Arabella. "Turkey's 2011 elections and beyond". Dalam Parliament UK 2011, dari www.parliament.uk/briefing-papers/SN06035. diakses 15 Januari 2018

¹⁹Ariefyanto, M Irwan, PM Turki Kecam Kudeta Militer di Mesir. Juli 2013, dari: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/07/06/mpibwk-pm-turki-kecam-kudeta-militer-di-mesir>. 30 Juli 2017

Muslimin dari penjara. Serta mengizinkan Organisasi Ikhwanul Muslimin untuk ikut berpartisipasi kembali dalam kehidupan politik di Mesir.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas pemutusan hubungan diplomatik Turki dan Mesir yang terjadi pada tahun 2013 karena beberapa alasan pertama yaitu pandangan pemerintah Turki terhadap pemerintah baru di Mesir. Pemerintah Turki adalah salah satu negara yang mengecam dan mengambil tindakan tegas mengenai kudeta militer di Mesir. Kedua yaitu perubahan rezim pemerintah di Mesir melalui kudeta, pemerintahan Mesir yang dipimpin oleh As-Sisi merupakan jabatan hasil kudeta dengan menglengserkan Mursi. Yang mengakibatkan perubahan kebijakan-kebijakan yang terjadi di Mesir. Ketiga yaitu perbedaan pandangan politik Antara Turki dan Mesir. Ideologi yang sama Antara AKP dan Ikhwanul Muslimin membuat Turki dan Mesir memiliki pandangan yang sama, sedangkan pandangan dengan pemerintah As-Sisi berbeda. Mesir yang pertama kali dipimpin oleh pemerintahan sipil kembali menjadi Mesir yang dipimpin oleh militer.

Daftar Pustaka

Buku

Bour Mouna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Penerbit Alumni, Bandung, 2005. hal.539-540

DR.Anak Agung Banyu Perwita, DR. Yanyan Mochammad Yani, 2006, Pengantar Hubungan Internasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 53-55.

K.J. Holsti,1984, *International Politics, A Framework for Analysis*, Third Edition, New Delhi: Prentice Hall of India

Pitana I Gde, I Ketut Surya Diarta, 2009, "*Pengantar Ilmu Pariwisata*", Yogyakarta, ANDI

Sumber Lain

Tim Redaksi.2013."*Turkey and Egypt losing ground as diplomatic dispute grows.*"
Dari http://www.todayszaman.com/diplomacy_turkey-and-egypt-losing-ground-as-diplomatic-dispute-grows_332723.html. diakses pada 30 Juli 2017

Ariefyanto, M Irwan, PM Turki Kecam Kudeta Militer di Mesir. Juli 2013, dari:<http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/07/06/mpibwk-pm-turki-kecam-kudeta-militer-di-mesir>. 30 Juli 2017

Karamuk, Oguz."*Will Erdogan's Policies Endanger Turkish Investments in Egypt?*".2012

<http://www.al-monitor.com/pulse/fa/business/2013/07/turkey-businessmen-egypt-fear-erdogan-support-morsi.html#>. Diakses pada 30 Juli 2017